

BAB I PENDAHULIAN

1.1 LATAR BELAKANG

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan yang memiliki peranan sangat penting, karena hingga saat ini beras tetap menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama di wilayah Asia. Di Indonesia, beras juga dianggap sebagai komoditas utama yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan politik (Purnamaningsih, 2006).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi isu utama dalam pembangunan dan harus menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pertanian. Permintaan pangan, sebagai kebutuhan dasar, akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang fokus pada pencapaian ketahanan pangan nasional, dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi serta peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ketergantungan masyarakat pada beras sebagai pangan pokok membuat pemerintah perlu terus memprioritaskan peningkatan produksi padi melalui berbagai upaya. Dengan memanfaatkan lahan sawah yang ada, selain penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produk (Evitaria, 2019).

Kebijakan nasional berfokus pada pelestarian ketahanan pangan, atau keamanan pangan. Hal ini sangat terkait dengan konsep keamanan manusia, yaitu poin ketahanan pangan internasional. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang memiliki kualitas aman dan bergizi cukup sehingga dapat mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan nutrisi sehari-hari agar memiliki kondisi kehidupan yang sehat dan layak.

Salah satu kebutuhan manusia yang paling penting adalah makanan. Oleh karena itu, ketersediaan pangan bagi masyarakat harus dijamin karena ini merupakan komponen penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas, tentu memerlukan kerja sama yang sistematis dari berbagai pihak, seperti dan para

pemangku kepentingan Masyarakat. Ekonomi, sosial, dan politik suatu negara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang stabil. (Azhar 2023)

Dengan mengedepankan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, program pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga mencapai swasembada berkelanjutan melalui peningkatan ketahanan pangan. Pelaksanaan program pembangunan pertanian diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta kemudahan bagi petani, termasuk subsidi dan bantuan lainnya. Bantuan pemerintah kepada kelompok tani dapat berupa uang tunai atau barang seperti benih varietas unggul, saprodi yang terlibat dalam program, dan bantuan alat pertanian. Selain itu, sejak tahun 2008, gabungan kelompok tani menerima bantuan tunai melalui program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Subsidi pupuk petani adalah salah satu subsidi pemerintah yang disebabkan oleh keterbatasan modal sebagian besar petani. Kebijakan subsidi pupuk memungkinkan petani mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah, yang memungkinkan peningkatan produksi yang berdampak pada ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani (Adriyani 2023).

Sejak tahun 1970, kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia telah diterapkan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui pemupukan teknologi dan untuk meningkatkan komoditas pertanian secara keseluruhan.

pertanian yang bertujuan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah harus mengatur mekanisme penyaluran dan pendistribusian agar kebijakan pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani secara akurat dalam hal jenis, jumlah, harga, mutu, waktu, dan tempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan pemupukan berimbang untuk memastikan ketahanan pangan (Irianto, 2014).

Pengelolaan program subsidi pupuk di Indonesia adalah salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya bagi kelompok tani. Namun, pelaksanaan program ini sering dihadapkan pada berbagai kendala, terutama terkait dinamika hubungan antara para aktor yang terlibat. Penelitian mengenai interaksi aktor dalam kebijakan subsidi pupuk di Indonesia mengungkap bahwa hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah

daerah, distributor, dan petani memiliki peran krusial dalam pengelolaan anggaran, distribusi pupuk, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan (Jamil, A., Ali, M., Fahmid, I., & Salman, D. 2023).

Pertanian padi adalah bagian penting dari perekonomian Sulawesi Selatan dan merupakan sumber utama makanan masyarakat. Dengan Kabupaten Pinrang, Wajo, dan Sidrap sebagai pusat produksi utama, daerah ini dianggap sebagai salah satu lumbung padi nasional. Produksi padi tinggi di wilayah ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi geografis yang mendukung, seperti lahan yang subur dan sistem irigasi yang cukup baik. Namun permasalahan seperti perubahan iklim, ketersediaan pupuk bersubsidi, dan modernisasi alat pertanian masih perlu diatasi. Potensi sektor ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional dapat didukung oleh dukungan kebijakan pemerintah yang tepat dan peningkatan teknologi pertanian.

Pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk untuk padi berdasarkan kebutuhan petani yang dicatat dalam sistem pertanian seperti Simluhtan. Subsidi Kuota pupuk ditetapkan berdasarkan jadwal tanam padi dan luas lahan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengatur kebijakan ini dan mencakup jenis pupuk yang disubsidi, seperti urea dan NPK, serta prosedur distribusi untuk memastikan bahwa petani yang berhak menerima subsidi. Petani harus tergabung dalam kelompok tani dan memiliki luas lahan yang tidak melebihi batas maksimal untuk mendapatkan subsidi. Keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan adalah tujuan dari kebijakan ini.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk diberikan kepada petani yang bergabung dalam kelompok pertanian yang menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sektor pertanian elektronik. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Nomor 521/071/01/2021/DTPHBUN memperkuat peraturan ini pada anggaran tahun 2021.

e-RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok adalah sistem elektronik yang mengawasi data petani. Petani yang ingin mendapatkan Kartu Tani harus terdaftar di sistem ini. Informasi tentang luas lahan dan jenis tanaman yang dikelola termasuk dalam data yang terdaftar. Bank yang bekerja sama dengan pemerintah, seperti Bank BRI, akan memberikan Kartu Tani kepada

petani setelah data mereka beroperasi. Dengan kartu ini, petani dapat membeli pupuk bersubsidi di toko pupuk yang terdaftar. Mesin pengambilan data elektronik, atau EDC, digunakan untuk melakukan transaksi, dan subsidi petani akan otomatis dipotong dari harga normal.

Kartu tani yang di berikan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan keringan kepada petani yang terdaftar dan memberikan kesejahteraan kepada setiap petani. Maka itu petani membuat sebuah kelompok yang di namakan kelompok tani, Kelompok Tani adalah organisasi yang terdiri dari petani yang memiliki tujuan dan jenis usaha pertanian yang sama atau ingin mengembangkan industri pertanian mereka bersama. Kelompok ini menawarkan wadah bagi para petani untuk bekerja sama dalam berbagai aspek bisnis pertanian, mulai dari perencanaan, produksi, hingga pemasaran hasil pertanian. Tujuan dari pembentukan Kelompok Tani adalah untuk meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan mereka, memberikan informasi seputar pertanian seperti program pupuk subsidi hingga pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah atau organisasi pertanian yang terkait.

Berikut adalah harga pupuk subsidi untuk tanaman padi di tahun 2024, namun harga pupuk subsidi biasanya berubah atau bervariasi di setiap daerah tergantung dari biaya distribusi, dan stok di masing-masing wilayah dan pemerintah bisa menyesuaikan harga pupuk subsidi sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Masyarakat petani.

Tabel.1 Harga Pupuk Subsidi Tahun 2024

Jenis Pupuk	Kandungan	Harga Subsidi (per kg)	Keterangan
Pupuk Urea	Nitrogen (N)	Rp 2.300 - Rp 2.800	Subsidi untuk petani padi dan tanaman lain
Pupuk NPK	Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K)	Rp 4.000 - Rp 5.500	Subsidi untuk mendukung pertumbuhan tanaman

Pupuk SP-36	Fosfor (P)	Rp 4.500 - Rp 5.500	Subsidi untuk fase pertumbuhan akar dan pembungaan
Pupuk ZA	Nitrogen (N), Sulfur (S)	Rp 2.500 - Rp 3.500	Subsidi untuk pemupukan susulan pada padi

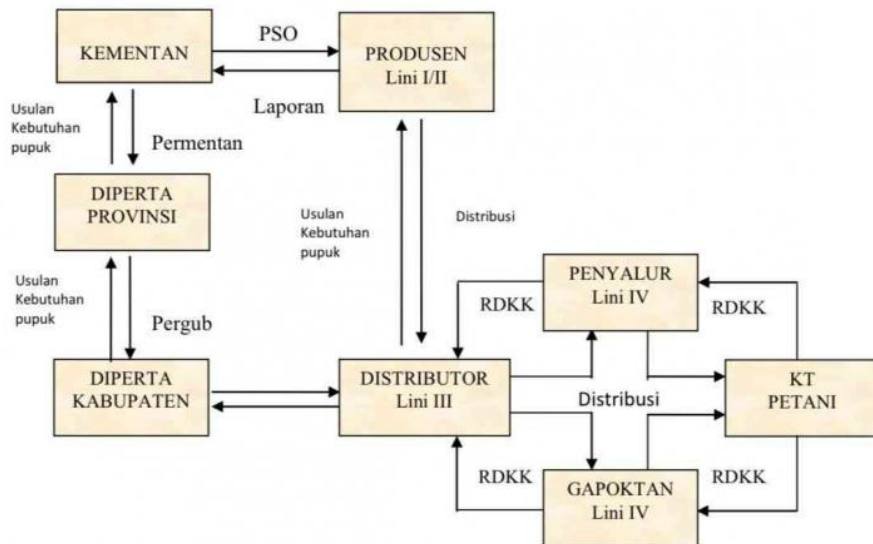
Sumber: www.pertanian.go.id

Salah satu kebijakan utama untuk pembangunan pertanian, subsidi untuk petani, telah diterapkan oleh pemerintah sejak lama, meskipun jumlah dan besarnya telah berubah seiring berjalannya waktu. Semua kebijakan yang berkaitan dengan subsidi dan distribusi pupuk telah direncanakan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi, dan sistem distribusinya. Namun berbagai kebijakan belum sepenuhnya mampu memastikan ketersediaan pupuk yang mencukupi dengan harga sesuai HET. Penyediaan pupuk murah melalui subsidi yang terus meningkat setiap tahun justru memicu inefisiensi penggunaan pupuk oleh petani dan mengurangi ketidaktepatan alokasi subsidi, dimana pihak- pihak lain juga mendapat manfaat dari petani kecil (Junianda, N. 2024).

Pemerintah berusaha menyediakan sarana produksi pupuk subsidi ini dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani untuk menyeimbangkan harga pupuk yang murah bagi penggunaannya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong produksi makanan dan pendapatan petani (Sularno, S., Irawan, B., & Handayani, N.2017).

Berikut merupakan rantai distribusi pupuk yang akan di salurkan kepada Masyarakat untuk dibagikan sesuai kebutuhan di daerah masing.

Gambar.1 Alur Penyaluran dan Distribusi Pupuk



Sumber: <https://www.kompasiana.com>

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa dalam distribusi dan penyaluran pupuk terdapat alur yang Panjang dan melibatkan berbagi aktor dalam pendistribusiannya hingga sampai kepada Masyarakat petani. Dan penyaluran dan distribusi pupuk tersebut diperlukan adanya pengawasan sehingga mengurangi resiko terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap pupuk yang akan dinagikan, jika hal seperti itu terjadi akan menimbulkan berbagai masalah yang kerap terjadi seperti, pendistribusian yang lambat, jumlah yang tdiak sesuai, hingga kelangkaan pupuk yang terjadi. Yang berdampak besar kepada petani yang membutuhkan.

Khususnya Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan terkenal sebagai pusat produksi padi nasional. Kabupaten ini memiliki lahan sawah yang sangat produktif karena topografinya yang sebagian besar dataran rendah dan didukung oleh sistem irigasi teknis seperti Bendungan Benteng dan Sungai Saddang. Sebagian besar masyarakat di Pinrang bergantung pada pertanian, khususnya padi, yang merupakan komoditas utama di daerah itu. Meskipun demikian, petani di daerah ini sering menghadapi masalah seperti pupuk bersubsidi yang tidak cukup, perubahan iklim, dan serangan hama. Untuk mendukung produktivitas

padi yang berkelanjutan di Kabupaten Pinrang, upaya modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi dan peningkatan infrastruktur terus dilakukan, namun kendala yang cukup seringkali dialami oleh petani di Kabupaten Pinrang yaitu pupuk subsidi yang di dapatkan petani yang seringkali tidak cukup.

Program pemerintah yang dikenal sebagai subsidi pupuk memberikan pupuk kepada petani dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, dan mendukung ketahanan pangan nasional dengan membantu petani. Peraturan pengaturan jenis, kuantitas, dan cara distribusi kebijakan ini agar dapat diterima oleh petani yang berhak. Pemerintah biasanya bekerja sama dengan produsen dan distributor untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lancar sesuai jadwalnya yang Dimana melibatkan beberapa aktor di dalamnya. Peraturan Menteri Pertanian Indonesia mengatur penggunaan data petani dalam sistem elektronik untuk mencegah penyimpangan. Penyimpangan ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pendistribusian dan akses terhadap pupuk yang seharusnya diperoleh oleh petani yang membutuhkan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat krusial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program pupuk subsidi terdapat permasalahan diatas dimana pengalokasian yang ada di kabupaten pinrang masih mengalami beberapa kendala dalam penyuluhan oleh pemerintah di berbagai Lokasi di Kabupaten Pinrang sehingga Masyarakat khususnya petani atau kelompok tani mendapatkan masalah mengenai seringnya terlambat bahkan kelangkaan pupuk subsidi yang harunya di dapatkan oleh Masyarakat petani.

Dalam konsep multi aktor peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program tidak luput dari peran diluar pemangku kebijakan. Dalam bukunya berjudul *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, John Kingdon 2014 menggunakan model "Multiple Streams Framework" untuk menjelaskan konsep multiaktor dalam proses kebijakan publik. Ia menyatakan bahwa tiga aliran utama masalah, kebijakan, dan politik di mana aktor dalam dan luar pemerintah berinteraksi membentuk kebijakan publik. Setiap aliran memiliki struktur dan dinamika yang berbeda.

Sementara itu, rancangan kebijakan alternatif sering dipengaruhi oleh pihak di luar pemerintahan, seperti media, akademisi, kelompok kepentingan, dan opini

publik. Ketiga aliran ini masalah yang mendesak, solusi kebijakan yang layak, dan konteks politik yang mendukung akhirnya bertemu pada saat tertentu yang disebut sebagai "window kebijakan", yang seringkali difasilitasi oleh "pengusaha kebijakan" yang menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk memanfaatkan peluang (John Kingdon 2014).

Namun penyaluran pupuk bersubsidi masih belum efektif karena banyak petani yang mengeluh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan petani dan sasarannya tidak tepat. Akibatnya, petani tidak cukup mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan mereka karena pendistribusian pupuk bersubsidi tidak memenuhi enam persyaratan yang tepat: lokasi, jenis, harga, kualitas, jumlah, dan waktu yang tepat.

Seperti yang terjadi di salah satu wilayah Kabupaten Pinrang, Desa Tanra Tuo di Kecamatan Cempa masih menghadapi masalah pendistribusian subsidi pupuk. Sering terjadi kekurangan pasokan dan kenaikan harga pupuk di tingkat petani, sehingga petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi harus datang sendiri ke kios pengecer. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua petani mampu membeli pupuk secara tunai atau bahkan membalikan pupuk secara mampu. Petani yang termasuk dalam kategori ini termasuk petani yang tidak memiliki sumber daya untuk membeli pupuk secara tunai atau cas, mereka biasanya membayar setelah panen, (M. N., Natsir, M., & Sahlan, S. 2022).

Namun yang terjadi di lapangan petani masih mendapatkan Kelangkaan subsidi pupuk untuk petani padi masih merupakan masalah besar bagi sektor pertanian di Kabupaten Pinrang. Petani sering mengalami kesulitan mendapatkan subsidi pupuk, yang berfungsi sebagai penunjang produktivitas utama lahan, terutama menjelang masa tanam. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, seperti sistem distribusi yang buruk dan ketidakseimbangan antara kebutuhan lapangan dan alokasi pupuk yang ditentukan pemerintah. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk karena penerapan subsidi pupuk oleh pihak-pihak tertentu. Kekurangan pupuk menyebabkan hasil panen menurun bagi petani kecil yang bergantung pada subsidi ini. Selain itu, kebijakan yang mengutamakan komoditas tertentu menyebabkan ketersediaan pupuk padi yang terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan komprehensif yang mencakup pengawasan yang lebih

ketat, penggunaan sistem digital seperti Kartu Tani, dan penyesuaian kebijakan untuk distribusi pupuk.

Untuk mewujudkan kebijakan pertanian yang tepat sasaran, diperlukan data pertanian yang akurat dan tepat waktu. Hasil Survei KSA menunjukkan bahwa luas panen padi Kabupaten Pinrang pada tahun 2023 mencapai sekitar 77,79 ribu hektar, turun sebanyak 77,77 ribu hektar (72,5 persen) dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, produksi padi tahun 2023 sebesar 454,77 ribu ton GKG, jika dikonversikan menjadi beras, mencapai sekitar 260,59 ribu ton, atau turun sebesar 53,92 ribu ton (77,75 persen) dibandingkan tahun 2022. Selain itu, hasil perhitungan produksi ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan kestabilan konsumsi beras di Kabupaten Pinrang jika dibandingkan dengan data konsumsi beras dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pada tahun 2023, neraca beras Kabupaten Pinrang mengalami surplus sebesar 274,77 ribu ton beras (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 2023). Dari hasil panen padi di atas menunjukkan bahwa penurunan hasil pendapatan yang di hasilkan oleh para petani di Kabupaten Pinrang, di perlukan peran pemerintah dan petani dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan pupuk subsidi dikeluhkan oleh para petani di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan di tahun 2022, masyarakat atau petani mengeluhkan pupuk subsidi yang disediakan pemerintah dikatakan kurang sehingga sudah ada beberapa lahan pertanian padi yang mengalami kerusakan akibatnya, bahkan petani hanya bisa meminjam pupuk sesama kelompok tani mereka (Detiksulsel.com). oleh karena itu ketersediaan pupuk bersubsidi sangat lah penting bagi petani untuk menunjang keberhasilan pertumbuhan hingga pasca panen nantinya.

Bukan hanya permasalahan kelangkaan pupuk yang sering terjadi namun pembagian pupuk yang sudah di tentukan seringkali mendapatkan masalah, seperti orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab seringkali mengambil atau mendapatkan pupuk yang tidak sesuai kebutuhan atau lebih dari jumlah yang telah di tentukan sehingga menimbulkan dampak masalah untuk para petani hingga kelompok tani yang memerlukan. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti jumlah pupuk yang tidak cukup lagi untuk dibagi kepada petani. Oleh karna itu dibutuhkan peran berbagai aktor yang terlibat didalamnya untuk mengawasi berjalannya penyaluran dan distribusi

pupuk subsidi bagi petani hingga dapat tepat dan sesuai dengan kebutuhan para petani.

Adanya praktik penyalahgunaan, seperti penyaluran pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran, merupakan masalah lain yang memperburuk efektivitas distribusi. Pengecer atau distributor besar lebih banyak menikmati pupuk ini daripada petani kecil yang membutuhkannya. Hal ini menyebabkan program subsidi yang seharusnya meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi, di tingkat petani, menjadi tidak efektif.

Hal ini juga di dapatkan oleh penelitian yang dilakukan Hidayat (2024) dengan judul penelitian Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone, Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap distribusi pupuk bersubsidi di Bone berfungsi dengan baik tetapi menghadapi masalah dengan standar fisik, Ditemukan bahwa pelanggaran dalam penjualan pupuk terutama berdampak pada kios daripada distributor, sehingga perlunya perhatian dalam pengawasan dalam penjualan pupuk subsidi. Saat ini di Kabupaten Bone masih ditemukan permasalahan-permasalahan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar terdapat dua harga pupuk harga subsidi dan non subsidi, panjangnya rantai distribusi dan dualisme harga pupuk ini menimbulkan kelangkaan pupuk serta pengoplosan pupuk subsidi dan non- subsidi. Tak hanya itu juga terjadinya pemalsuan pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan terhadap wilayah tanggung jawab masing-masing pengecer resmi dan pemalsuan kuota pupuk juga kerap terjadi.

Sehingga di perlukan peran pemerintah dan aktor yang terlibat dalam pengelolaan distribusi penyaluran pupuk subsidi bagi Masyarakat yang mata pencariannya di bidang pertanian padi khususnya di Kabupaten Pinrang, agar petani bisa mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan dan diwaktu yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangan padi sawah mereka dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil panen yang melimpah tidak seperti di tahun-tahun lalu.

Pertanian merupakan mata pencarian Sebagian besar Masyarakat di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, sehingga perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberlangsungan pertanian, Dimana Masyarakat seringkali mengeluhkan bahan pokok pupuk subsidi yang harusnya

mereka dapatkan namun seringkali terlambat bahkan menjadi Langkah. (John W. Kingdon 2014) "*Agendas, Alternatives, and Public Policies*" mengembangkan konsep multi-aktor yang menjelaskan bagaimana berbagai pihak berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan publik. Kingdon menyoroti peran aktor-aktor yang terlibat baik dari dalam maupun luar pemerintah, dan bagaimana interaksi mereka memengaruhi agenda kebijakan, alternatif kebijakan, dan proses pengambilan keputusan.

Dari segi Distributor dan pengencer kios terus menyimpang dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, yang menyebabkan petani mendapat harga yang tidak adil. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk mencegah hal ini terjadi. Selain itu, peraturan mengenai penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi telah ditetapkan oleh pemerintah di tingkat pusat oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Di tingkat provinsi, gubernur menetapkan pengawasan, dan di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota mengatur pengawasan. Semua organisasi ini bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah. Namun dari hal tersebut masih ada oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran aturan saat penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (Hidayat 2024).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, PT. Pupuk Indonesia (Persero) memiliki tanggung jawab untuk mengelola pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengadaan dan sosialisasi pupuk bersubsidi di sektor pertanian, dapat merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013. Agar tidak menghambat program ketahanan pangan, sistem distribusi pupuk perlu memastikan ketersediaannya di tingkat petani, dengan menerapkan tujuh prinsip dasar (jenis, jumlah, lokasi, mutu, waktu, sasaran, dan harga) yang sesuai dengan kebutuhan petani. Penegakan keamanan, yang mencakup pengawasan dan pengawalan yang terkoordinasi antara instansi terkait baik di pusat maupun daerah, sangat penting untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar. Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Menteri diberi wewenang

untuk melakukan pembinaan kepada BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer Pupuk Bersubsidi serta berkoordinasi dengan Menteri atau Kepala Instansi terkait. (Herlambang, dkk 2023)

Kabupaten Pinrang merupakan wilayah yang terletak di Sulawesi Selatan yang memiliki distrik pertanian yang cukup luas sehingga Sebagian besar Masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka dari itu Masyarakat sangat bergantung pada pertanian khususnya padi, namun dalam hal tersebut masih memiliki berbagai kendala dalam produktifitas penanaman hingga pasca panen dimana seringkali petani mengeluhkan masalah seperti keterlambatan bahkan kelangkaan pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah hingga membuat petani mendapatkan masalah pertumbuhan padi, yang mengakibatkan pendapatan dari produksi padi menjadi berkurang. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dari pemerintah terkait hingga aktor yang terlibat didalam penyuluhan atau distribusi pupuk subsidi di perhatikan dari segi pengawasan sehingga bisa sampai kepada kelompok tani yang memang telah terdaftar dan membutuhkan.

Teori multi aktor sangat menekankan dalam hal Kerjasama atau collaborative antar berbagai pihak yang terlibat didalamnya, mulai dari pemangku jabatan, pelaksana, pihak swasta, dan Masyarakat yang menggunakan program yang dibentuk, seperti dengan program pengelolaan pupuk subsidi bagi kelompok tani di Kabupaten Pinrang dimana banyak aktor yang harus memainkan peranya masing-masing agar program tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Dari permasalahan diatas adapun rumusan masalah yang akan dirujukkan penulis antara lain sebagai berikut;

- a. Bagaimana kebijakan pengelolaan pupuk subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan petani?
- b. Bagaimana interaksi antara berbagai aktor dalam kebijakan pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang.

1.2 Tinjauan Teori

i. Multi – Aktor

James E. Anderson, 1979 dalam (Dwiyanto Indiahono, 2009: 17). mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau seperangkat aktor dalam suatu bidang kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan publik dianggap sebagai hasil

interaksi dinamis antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat secara umum. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada keputusan formal yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan yang dipengaruhi oleh tekanan dan peran dari aktor-aktor yang beroperasi di luar struktur pemerintahan formal.

Agenda Setting merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam seluruh proses kebijakan publik. Proses ini merujuk pada penentuan isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas dalam agenda pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, agenda setting tidak hanya bergantung pada keputusan formal dari pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, para analis kebijakan menempatkan tahap ini sebagai titik kritis dalam memahami bagaimana kebijakan publik dibentuk dan diterima oleh berbagai pihak.

Charles Lindblom (1980), maupun James P. Lester dan Joseph Steward, Jr (2000), aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk kedalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislative dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok peran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warganegara individu. Secara umum sesungguhnya aktor ini dapat dikategorikan dalam tiga yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (civil society). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik (Moore 1995:112 dalam Yakin,dll 2013).

Dalam bukunya *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, (John Kingdon 2014) menguraikan bahwa pembentukan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh satu entitas atau individu, tetapi merupakan hasil interaksi dinamis dari berbagai aktor. Kingdon memperkenalkan konsep multi-aktor sebagai elemen kunci dalam memahami bagaimana agenda kebijakan dibentuk, alternatif ditentukan, dan keputusan dibuat. John Kingdon dalam bukunya *Agendas, Alternatives, and Public Policies* menyoroti pentingnya peran berbagai aktor dalam pembentukan kebijakan publik. Konsep ini menunjukkan bahwa proses kebijakan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh satu pihak, tetapi merupakan hasil

interaksi dan dinamika yang melibatkan berbagai aktor baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Konsep multi aktor dalam teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh John Kingdon (2014) juga mengidentifikasi pentingnya tiga aliran utama dalam proses pembuatan kebijakan: masalah (*problem stream*), solusi (*policy stream*), dan politik (*political stream*). Masing-masing aliran ini dipengaruhi oleh berbagai aktor yang berperan dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan menciptakan momentum politik untuk mendukung kebijakan. Aliran masalah berfokus pada pengakuan dan penentuan masalah yang perlu diatasi, sementara aliran solusi berkaitan dengan penyusunan alternatif kebijakan. Aliran politik, di sisi lain, mencakup faktor-faktor seperti perubahan kepemimpinan, sikap masyarakat, dan dukungan politis yang dapat membuka peluang untuk kebijakan tertentu. Ketika ketiga aliran ini bertemu dalam "jendela kebijakan," terjadilah proses di mana kebijakan baru dapat muncul dan diterapkan. Kingdon menekankan bahwa proses ini sering kali melibatkan interaksi dan negosiasi antara aktor-aktor dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda, yang bisa berujung pada hasil kebijakan yang lebih kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, teori multi aktor ini menggarisbawahi bahwa kebijakan publik bukan hanya hasil dari keputusan pemerintah atau pemangku kebijakan tunggal, melainkan juga hasil dari interaksi antara berbagai aktor dalam sistem politik yang lebih luas.

Proses pembentukan kebijakan publik melibatkan berbagai aktor yang berperan dalam mengarahkan agenda, menentukan alternatif kebijakan, dan membuat keputusan. Aktor-aktor ini mencakup presiden, Kongres, birokrat di lembaga eksekutif, kelompok kepentingan, media, akademisi, dan masyarakat umum. Setiap aktor memiliki kontribusi unik dalam proses ini. Presiden dan anggota legislatif sering menjadi penggerak utama dalam menetapkan agenda, sementara spesialis teknis dan akademisi berperan penting dalam mengembangkan alternatif kebijakan yang konkret. Media berperan dalam membangun opini publik dan memfokuskan perhatian pada isu-isu tertentu, sedangkan kelompok kepentingan menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Interaksi antara aktor-aktor ini menciptakan dinamika kompleks, di mana persaingan kepentingan, perubahan politik, dan perubahan opini publik menjadi faktor penentu keberhasilan atau

kegagalan suatu kebijakan. Dengan memahami kolaborasi dan konflik antar aktor, kita dapat melihat bagaimana kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keputusan akhir, tetapi juga oleh perjalanan panjang dari pengakuan masalah hingga pelaksanaan keputusan tersebut

Dalam *Agendas, Alternatives, and Public Policies*, John Kingdon menjelaskan konsep multiaktor. Konsep ini sangat relevan dengan kajian dalam ilmu administrasi publik, yang merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana kebijakan publik dirancang, dilaksanakan, dan dinilai. Dalam penelitian ini, peran aktor-aktor sangat ditekankan, baik dalam dan di luar pemerintahan. Untuk memahami dinamika ini, terutama dalam hal menetapkan agenda dan membuat kebijakan, model Kingdon memberikan kerangka analitis.

Dalam (John Kingdon 2014) membagi aktor kebijakan menjadi dua kelompok besar: **aktor internal (inside government)** dan **aktor eksternal (outside government)**. Aktor internal meliputi presiden, Kongres, birokrat, dan pejabat pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan formal untuk menetapkan agenda dan keputusan kebijakan. Di sisi lain, aktor eksternal mencakup kelompok kepentingan, akademisi, media, konsultan, dan publik umum yang memengaruhi agenda melalui advokasi, penelitian, atau opini publik.

Dalam administrasi publik, aktor pemerintah, seperti politisi dan birokrat, termasuk dalam struktur formal yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan. Mereka memiliki wewenang administratif dan legal untuk menjalankan kebijakan. Administrasi publik juga memperhatikan aktor di luar pemerintahan, seperti media, kelompok kepentingan, dan akademisi. Ini terutama berlaku dalam teori jaringan kebijakan. Administrasi publik kontemporer memahami bahwa kerja sama antara sektor publik dan nonpublik sangat penting untuk pembuatan kebijakan yang efektif.

Dalam buku tersebut, (Kingdon 2014) membagi aktor-aktor kebijakan ke dalam dua kategori utama, yaitu Pemerintah (Government) dan di Luar Pemerintah (Outside Government). Pada kategori Pemerintah, terdapat tiga jenis aktor yang diklasifikasikan, yaitu administrasi, birokrat, dan parlemen. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing aktor disajikan berikut ini:

1) Administrator

Administrator mencakup presiden, staf kepresidenan, dan pejabat tinggi yang ditunjuk secara politik. Mereka memainkan peran penting dalam

menentukan agenda kebijakan (agenda setting) dan memiliki pengaruh besar dalam memutuskan prioritas nasional. Presiden, misalnya, sering menjadi pusat perhatian karena otoritasnya untuk memfokuskan perhatian pada isu-isu tertentu. Staf kepresidenan dan pejabat tinggi bekerja untuk mengelola implementasi kebijakan serta memastikan arahan presiden diterjemahkan ke dalam tindakan konkret.

2) Birokrat

Birokrat adalah pegawai negeri karier yang bekerja dalam sistem pemerintahan untuk melaksanakan program dan kebijakan yang ada. Mereka memiliki keahlian teknis yang memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam menyusun alternatif kebijakan. Namun, peran mereka lebih besar pada tahap implementasi dan spesifikasi alternatif daripada pada tahap agenda setting. Birokrat sering berfungsi sebagai "pekerja belakang layar," memberikan nasihat teknis dan memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efisien. Meskipun mereka jarang menjadi penggerak utama dalam agenda, hubungan mereka dengan kelompok kepentingan dan legislatif memungkinkan mereka untuk memberikan pengaruh tidak langsung.

3) Legislatif

Parlemen, yang terdiri dari anggota Kongres atau legislatif, adalah aktor penting dalam proses kebijakan, terutama dalam menetapkan undang-undang dan menyetujui anggaran. Kingdon mencatat bahwa anggota legislatif sering kali bertindak sebagai penggerak utama dalam mengangkat isu-isu tertentu ke tingkat nasional. Ketua komite atau anggota legislatif yang berpengaruh dapat memainkan peran besar dalam yang diperlukan untuk merancang kebijakan, staf mereka dan konsultasi dengan birokrat dan pakar membantu mereka dalam proses ini.

John Kingdon (2014) dalam *Agendas, Alternatives, and Public Policies* mengidentifikasi berbagai aktor di luar pemerintahan yang berperan penting dalam pembentukan kebijakan publik. Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan formal seperti aktor dalam pemerintahan, aktor eksternal ini memengaruhi agenda dan alternatif kebijakan melalui advokasi, penelitian, dan

pembentukan opini publik. Aktor-aktor ini meliputi kelompok kepentingan, media, akademisi, konsultan, partai politik, dan masyarakat umum.

1. Interest Grup

Kelompok kepentingan memainkan peran besar dalam kebijakan publik. Mereka sering bertindak untuk melindungi kepentingan mereka dengan memengaruhi agenda pemerintah. Meskipun kelompok ini lebih sering berperan sebagai penghambat (blocking factors) daripada penggerak agenda, mereka juga berupaya memasukkan alternatif kebijakan yang mereka dukung ke dalam diskusi setelah agenda ditetapkan. Kelompok dengan sumber daya besar, seperti pengaruh elektoral atau kekuatan ekonomi, cenderung lebih efektif dalam mendorong agenda mereka.

2. Media

Media berfungsi sebagai katalisator dalam memperbesar perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Namun, pengaruh media sering kali tidak langsung. Media lebih cenderung melaporkan isu yang sudah muncul dalam agenda pemerintah daripada menciptakan isu baru. Selain itu, media memiliki dampak tidak langsung dengan memengaruhi opini publik yang pada akhirnya dapat memengaruhi politisi.

3. Akademisi dan Konsultan

Akademisi, peneliti, dan konsultan lebih sering terlibat dalam penyusunan alternatif kebijakan daripada dalam penetapan agenda. Mereka menyediakan analisis berbasis bukti dan solusi teknis untuk isu-isu kebijakan. Peran mereka sangat penting dalam memengaruhi arah kebijakan jangka panjang melalui penelitian dan pengembangan ide-ide kebijakan.

4. Partai Politik

Partai politik dapat memberikan pengaruh besar pada agenda pemerintah, terutama dengan partai yang memiliki wakil-wakil yang ada di legislative, dimana mereka dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang ada dan yang akan dibentuk. Hal ini dikarenakan partai politik memiliki sumber dukungan yang begitu besar di setiap lapisan

sehingga dengan memunculkan isu atau pembaharuan dapat memberikan perhatian besar.

5. Masyarakat Umum

Opini publik lebih sering berperan sebagai batasan daripada penggerak agenda. Artinya, tekanan publik dapat mencegah pemerintah mengambil langkah tertentu, tetapi jarang mendorong isu baru secara langsung. Namun, persepsi tentang suasana nasional atau keinginan masyarakat dapat menciptakan momentum untuk perubahan kebijakan

ii. Kerangka Pikir

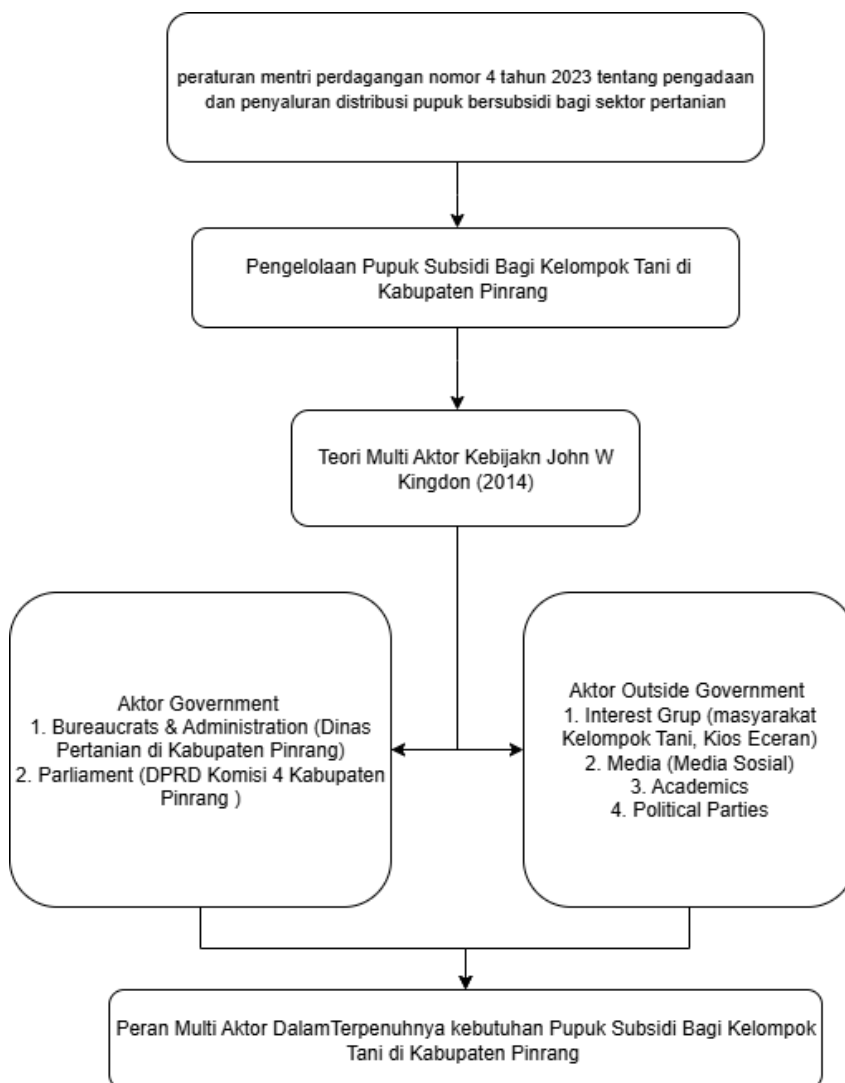
Kerangka pemikiran berfungsi sebagai pijakan utama dalam mengembangkan berbagai konsep dan teori yang mendukung suatu penelitian. Kerangka ini harus berlandaskan pada teori tertentu yang tidak hanya menjadi dasar, tetapi juga alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam teori John Kingdon dalam *Agendas, Alternatives, and Public Policies* mengidentifikasi dan membagi dua multi aktor yang terlibat didalamnya yaitu government dan terbagi administrator (administrasi), birokrat (bureaucrats), dan legislatif/parlemen (parliament) yang dapat menentukan dan membuat kebijakan dan Outside Government di luar pemerintahan yang berperan penting dalam pembentukan kebijakan publik.

John Kingdon dalam *Agendas, Alternatives, and Public Policies* menekankan bahwa pembentukan kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling berinteraksi. Jika diterapkan dalam konteks pengelolaan pupuk subsidi bagi kelompok tani di Kabupaten Pinrang, konsep multi-aktor ini dapat menjelaskan bagaimana berbagai pihak berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan subsidi pupuk.

Adapun Kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

Gambar.2 Kerangka Pikir



Melalui gambar atau kerangka konsep dan alur penelitian di atas maka peneliti memiliki Gambaran untuk mendapatkan sebuah jawaban dalam penelitian nantinya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

i. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang dituliskan di atas maka Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian sebagai berikut;

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pengelolaan pupuk subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan petani dalam rangka mencapai efektivitas distribusi dan penggunaan pupuk?
- b. Untuk menganalisis interaksi antara berbagai aktor (pemerintah, distributor, petani, dan masyarakat) dalam pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang

ii. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan memasukkan faktor-faktor baru yang relevan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang subjek yang serupa atau untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif yang dapat membantu perkembangan ilmu administrasi.

2. Manfaatn Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam bidang administrasi publik. Hasilnya dapat digunakan sebagai panduan bagi pengambil kebijakan, praktisi, atau lembaga terkait dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bermanfaat untuk perbaikan praktik lapangan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah cara penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dengan memberikan gambaran yang luas dan kompleks, melaporkan perspektif mendalam dari berbagai sumber informasi. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian metode kualitatif deskripsi yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data berdasarkan apa yang dilihat, diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data sesuai dengan keadaan lapangan (Lestari et al., 2022, dalam Fahrudin 2023).

Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks yang dapat dikomunikasikan dengan kata-kata, melaporkan perspektif terinci yang diperoleh dari sumber informan, dan melakukannya dalam lingkungan alami (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77 dalam Fadli 2021). Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Multi aktor yang terlibat dalam pengelolaan program pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang.

2.2 Desain Penelitian

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi dan hubungan antara berbagai aktor yang berpartisipasi dalam pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang. Creswell (2014) menyatakan bahwa metode ini memungkinkan penyelidikan fenomena sosial yang kompleks, yang mencakup perspektif, pengalaman, dan praktik yang diterapkan oleh aktor seperti distributor, pemerintah daerah, dan kelompok tani. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan pupuk subsidi digunakan dan masalah yang dihadapi oleh para aktor saat melakukannya.

2.3 Prosedur Penelitian

i. Penentuan Informan

Pada penelitian ini untuk memudahkan dalam pengumpulan data penulis telah menentukan objek informan yang terkait atau aktor yang terlibat di dalam pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang, sehingga peneliti dapat mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini. Melihat dari teori yang digunakan yaitu Multi Aktor yang di jelaskan oleh John Kingdon dalam teorinya terdapat beberapa indikator yang perlu dilibatkan dalam pengumpulan data, berikut merukan informan yang terbagi mejadi dua yaitu Government Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, dan DPRD komisi 4 Kabupaten Pinrang dan Outside Government Masyarakat, Kelompok Tani, Kios eceran pupuk, academics, media sosial, dan political parties.

ii. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Obersvasi merupakan sebuah Teknik dengan cara mengamati, menganalisa dan mencatat isu atau fenomena yang ada dilapangan. Data seperti itu bisa didapatkan diperolah melalui pengamatan panca indra. Maka itu peneliti dapat turun langsung untuk kelapangan, di Kabupaten Pinrang untuk mengamati dan mencatat mengenai permasalahan mengenai aktor yang terlibat dalam pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang, sehinggann peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab dan pertemuan langsung antara pewawancara dan informan melalui penggunaan alat yang dikenal sebagai pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara lisan dengan bentuk yang terstruktur.

Wawancara diperlukan dalam pengumpulan data dalam melihat multi aktor yang terlibat didalam pengelolaan pupuk subsidi, yang dimana informan di dalamnya terbagi dua yakni Government dan Outside Government. Dengan teknik ini dapat melihat sikap dan pendapat aktor yang terlibat dalam pengelolaan pupuk subsidi.

3. Telaah Dokumen

Dokumen adalah bahan baik melalui kajian literature UndangUndang, Dokumen, Surat-surat, keputusan-keputusan, majalah, surat kabar, dan foto-foto yang ada di lokasi penelitian. Pencatatan berupa pengumpulan data dengan cara mencatat data yang telah ada pada instansi terkait yang belum tercantum di dalam pedoman wawancara. Dokumen sangatlah penting bagi penelitian dikarenakan dengan teknik ini kita bisa mendapatkan data yang kongkrit dan dapat dipercaya dengan adanya bukti dokumen.

iii. Teknik Analisis Data

Dalam menunjang keberhasilan penelitian diperlukan adanya teknik analisis data yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga dapat Menyusun hasil data secara sistematis adapun teknis analisis data yang digunakan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Dalam sebuah penelitian, reduksi data merupakan proses dalam bentuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas data yang akan di oleh dalam sebuah penelitian. Proses ini dapat mengurangi data yang tidak signifikan agar lebih mudah dalam menganalisis sebuah data yang akan diolah agar menjadi data yang murni.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses dari penelitian yang telah dilakukan dari semua proses pengumpulan data dan diolah, sehingga data yang didapatkan yang biasanya dalam bentuk narasi, teks, diagram, tabel, bagan yang memiliki tujuan agar memperdalam pemahaman dari penelitian dari informasi dan menyajikan dalam bentuk tabel atau penjelasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dari penelitian yang dimana dari semua pembahasan dan data yang telah diperoleh dengan cermat dibuatkan dalam bentuk penjelasan yang padat atau singkat untuk menguraikan semua pembahasan di dalam penelitian, Sehingga data-data yang diperoleh dapat diuji validitasnya.

iv. Validitas dan Reliabilitas Data

validitas penelitian kualitatif lebih menekankan pada kepercayaan, kejelasan, dan triangulasi. Akibatnya, metode ini mengandalkan pengamatan langsung melalui, wawancara mendalam, dan verifikasi data dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti (Creswell 2018). Validitas yang digunakan dalam Multi Aktor dalam pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang, diantaranya sebagai berikut:

1. Validitas

a) Triangulasi

Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang sudah ada. Ada beberapa jenis triangulasi, termasuk triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

b) Member check

Member check merupakan pengecekan ulang data yang di peroleh dari informan atau pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan data yang diterima oleh informan dan yang terjadi dilapangan. Sehingga dapat menyesuaikan data yang akan ditulis pada penelitian dari Multi Aktor dalam pengelolaan pupuk subsidi di Kabupaten Pinrang.

2. Realibitas Data

Realibitas data merupakan salah satu metode yang dapat mengukur ketepatan data pada penelitian kualitatif, apakah telah sesuai dengan data yang didapatkan dengan permasalahan yang ada pada fenomena yang terjadi dilapangan. Reliabilitas dalam penelitian mengacu pada keandalan metode dengan alat ukur yang digunakan sehingga data dapat dipercaya dan diterapkan kembali tanpa ada perubahan yang signifikan.